



Pendidikan Politik Pembangunan: Telaah Rezim Sustainable Development Goals (SDGs) pada Calon Aparatur Pemerintah (Praja IPDN Kampus NTB)

Alfian Hidayat¹, Purnama Safitri²

^{1,2} Universitas Mataram, Indonesia

ABSTRACT

DEVELOPMENT POLITICAL EDUCATION: REGIME REVIEW OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TO PROSPECTIVE GOVERNMENT APPARATUS (CADET IPDN OF NTB CAMPUS). The service activity is intended to provide insight and insight to prospective state apparatuses (IPDN cadets) regarding the strategy of implementing SDG's (Sustainable Development Goals) for 3 development sectors namely socioeconomic and environmental. In 2015 a global agreement on development was formulated at the United Nations Sustainable Development Summit with 17 global development goals. In realizing Sustainable Development in the midst of globalization and regionalization, demands a proactive local government and has a strategy in establishing partnerships in the form of international cooperation. The success of achieving the SDGs will depend on an inclusive global partnership with active involvement from both central and regional governments (cities/districts/provinces) with civil society, the private sector, philanthropic institutions, academics and UN agencies. This dedication activity provides a deepening of SDGs in the social aspect by emphasizing the issue of gender equality, then in the economic aspect emphasizing the issue of economic growth and innovation (through the Global Value Chain approach), finally the environmental aspects emphasizing the issue of climate change. The method of this activity is carried out with a workshop model by giving material in class.

Keywords: Exclusivity, Government Apparatus, Gender, Global Value Chain, Sustainable Development Goals.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
30.01.2020	20.04.2020	01.05.2020	19.05.2020

Suggested citation:

Hidayat, A., & Safitri, P. (2020). Pendidikan politik pembangunan: Telaah rezim Sustainable Development Goals (SDGs) pada calon aparatur pemerintah (Praja IPDN kampus NTB). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 627-633. <https://doi.org/10.30653/002.202052.515>

Open Access | URL: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/515>

¹ Corresponding Author: Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115, Indonesia. Email: alfian.hidayat@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan pertama kali disebut oleh Presiden Amerika Serikat Harry Truman pada dekade 1950-an. Pada masa itu, Truman menyebut negara dunia ketiga yang tidak berkembang (*undeveloped*) dan negara-negara tersebut menjadi bagian tanggung jawab AS sebagai hegemon. Sejak itu, pembangunan menjadi agenda global terbesar di dunia, dan pembangunan pun diidentikkan tidak saja sebagai bagian dari pembangunan negara dunia ketiga, namun juga sebagai strategi geopolitik pada masa Perang Dingin untuk membendung ideologi komunisme. Terlepas dari kontroversi dan kritik pembangunan sebagai alat penguasaan, proyek pembangunan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap negara-negara tidak berkembang tersebut.

Nilai utama dalam pembangunan adalah progresifitas atau kemajuan, dimana pembangunan didefinisikan sebagai proses kemajuan dari fase tradisional ke fase modern. Fase modern kerap diidentikkan sebagai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi serta kompleksitas institusi sosial yang menyokong dinamika perkembangan masyarakat modern. Namun sayangnya, pembangunan juga kerap disertai pelbagai persoalan yang menghambat pembangunan itu, seperti kemiskinan, persoalan kelangkaan pangan (kelaparan), konflik, perubahan iklim, serta persoalan akses pendidikan dan kesehatan. Persoalan-persoalan tersebut terus mengemuka dan menjadi masalah global yang menjadi perhatian masyarakat atau komunitas internasional.

Persoalan global tersebut tidak semata mata dilihat sebagai persoalan yang ada sebelum pembangunan, namun dalam konteks tertentu persoalan global tersebut dapat dilihat sebagai eksekusi atau dampak pembangunan. Industrialisasi dan perkembangan di pelbagai negara kerap tidak berjalan merata dan kerap bertumpu di daerah perkotaan yang kemudian memunculkan urbanisasi, kemiskinan, dan kesenjangan. Pembangunan sebagai sebab bukanlah suatu persoalan sederhana yang dimuarakan pada satu persoalan, namun masalah sosial, lingkungan dan ekonomi amatlah kompleks. Namun, dari semua studi beberapa menyebut bahwa kapasitas manajerial pembangunan dan perspektif pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi disebut sebagai beberapa faktor pemicu munculnya persoalan-persoalan tersebut.

Menjelang dekade 2000, dunia semakin diperhadapkan dengan masalah-masalah pembangunan global terutama persoalan kesenjangan dan kemiskinan. Disadari karena kompleksitas persoalan tersebut, tidak saja membutuhkan analisis yang tepat, solusi yang tepat pula namun juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih baik dan peningkatan kapasitas pembangunan itu sendiri. Hal inilah kemudian yang mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menginisiasi suatu pendekatan pembangunan yang lebih holistik, dimana tujuan pembangunan tidak lagi direduksi sebagai makna pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan harus bertujuan membangun kehidupan yang lebih baik di berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB, disepakati Deklarasi Millenium PBB yang kemudian dikenal sebagai *Millenium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Millenium) yang kemudian disingkat sebagai MDGs.

MDGs secara mendasar merupakan suatu pendekatan atau paradigma pembangunan yang menegaskan bahwa tujuan pembangunan yang utama adalah pemenuhan hak dasar manusia. Di dalam MDGs termuat delapan (8) tujuan

pembangunan utama, yakni 1). Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2). Mencapai pendidikan dasar untuk semua, 3). Mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, 4). Menurunkan angka kematian anak, 5). Meningkatkan kesehatan ibu, 6). Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7). Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan 8). Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Pada tahun 2015, PBB mengadopsi *sustainable development goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) atau SDGs, menggantikan MDGs yang memang berlaku hingga tahun 2015. Sama seperti MDGs, masa berlaku SDGs ditetapkan selama 15 tahun yakni dari tahun 2015-2030, memuat 17 tujuan dan 169 sasaran. SDGs dianggap lebih komprehensif mengakomodasi persoalan-persoalan pembangunan yang juga mencakup perubahan-perubahan global pasca MDGs, selain itu SDGs juga dianggap lebih inklusif karena pada proses inisiasi melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas (SMERU, 2016) dan juga dipandang lebih partisipatoris karena memberi ruang yang lebih luas bagi aktor masyarakat sipil dan kelompok ekonomi swasta dalam pencapaian tujuan dan target SDGs.

Untuk mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan ditengah arus globalisasi dan regionalisasi ini karena itu dituntut sebuah pemerintah daerah yang proaktif dan memiliki strategi dalam menjalin mitra dalam bentuk kerjasama internasional. Beranjak dari situasi ini maka Pengabdian Masyarakat kali ini berusaha untuk memberikan suatu penguatan peran dan strategi Dalam Kerjasama Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan bagi praja IPDN di Praya Lombok Tengah. Mengapa kami memilih praja IPDN karena mereka ini nantinya yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan pemerintah daerah di NTB sehingga perlu bagi mereka untuk mendapatkan wawasan dan ilmu mengenai peran dan strategi apa yang diperlukan Pemerintah kota/kabupaten yang ada di NTB untuk dapat meningkatkan kerjasama internasional.

METODE

Upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah digambarkan di atas adalah dengan sosialisasi yang intensif. Model sosialisasi yang digunakan adalah dengan pemberian materi dan focus group discussion. Calon aparatrur diberikan materi yang intens dengan metode diskusi, menyangkut pemberian materi tanya jawab serta telaah implementasi yang telah dilakukan sampai saat ini. Materi pelatihan terangkum ke dalam 3 aspek utama SDGs yakni sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pada aspek sosial memuat kesetaraan gender dalam pembangunan, berikutnya pada aspek ekonomi memuat tentang pertumbuhan ekonomi dan pada aspek lingkungan memuat perubahan iklim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antusiasme pihak institut pemerintahan dalam negari kampus NTB mengenai isu pembangunan dalam mempersiapkan calon aparatrur negara menjadikan pengabdian ini dinilai cukup efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan. Beberapa hal yang

mendasari tersebut diantaranya, Pertama, Praja IPDN telah cukup mampu memberikan wawasan pembangunan yang relevan dengan SGDs dilihat melalui diskusi dan tugas kelompok yang diberikan. Kedua, sebagai calon aparatur, praja telah menunjukkan komitmen melalui idealisme dalam menjawab pertanyaan dan permasalahan dalam pemberian materi khususnya menyangkut aspek lingkungan dan sosial. Ketiga, pihak instituti yaitu IPDN menginisiasikan untuk keberlanjutan program pengabdian ini dengan tema pembangunan berkelanjutan.

Beberapa meteri yang diberikan selama pengabdian:

Aspek Ekonomi: Industri Lokal Ke Pasar Global (Metode GVC)

Secara sederhana, GVC dipahami sebagai fragmentasi proses produksi melalui rantai pasok internasional. Urgensi studi rantai nilai global atau GVC lahir dari transformasi perdagangan global akibat globalisasi. Dalam era globalisasi, struktur pasar amat ditentukan oleh aliran investasi yang bebas. Berkat dari globalisasi, perusahaan-perusahaan internasional pun mulai meninggalkan model produksi industri *fordisme* yang mensyaratkan koordinasi hulu-hilir dalam satu perusahaan. Model produksi ini kini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien, dan relatif mahal. Sedangkan produksi dalam mode industri post-fordisme menciptakan dinamika baru dalam perdagangan internasional. Berkat globalisasi, para perusahaan internasional memilih melakukan strategi *outsourcing* terhadap bagian-bagian atau beberapa tahapan produksi mereka di beberapa negara. Hal ini diakibatkan karena menurunnya biaya transportasi dan komunikasi yang juga mengakibatkan semakin mudahnya biaya koordinasi. Hal ini pun mengakibatkan menguatnya formasi jejaring produksi regional maupun global. Dalam formasi baru ini, perdagangan internasional di dominasi oleh perdagangan produk pertengahan (*intermediate*) dan produk yang memiliki nilai tambah (*upgraded goods*) yang dipandang sebagai komponen penting dalam produksi industri ekspor.

Formasi perdagangan global dalam era globalisasi yang menyebabkan semakin terfragmentasi produksi global sesungguhnya menimbulkan peluang dan tantangan. Namun bagi para analis GVC, jika dapat mengatasi tantangan-tantangan baru maka perdagangan global atau globalisasi akan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pelaku pasar, terutama sektor swasta. Fragmentasi produksi internasional ini juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang, karena tidak memerlukan kompetensi di seluruh aspek produksi, namun justru menekankan peluang untuk berkonsentrasi pada peningkatan kompetensi pada aspek-aspek tertentu yang bisa diperkuat oleh *advantage competitive* yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan, peluang untuk mengambil manfaat dan berkompetisi di pasar global terbuka bagi siapa saja, termasuk para pelaku industri skala kecil dan menengah (UMKM). Namun tentu saja, meski hanya untuk meningkatkan kompetensi ada satu aspek atau tahapan produksi tertentu, tetap memerlukan daya dukung yang komprehensif sehingga para pelaku industri ini memiliki kapasitas *upgrading* produk secara maksimal. Peningkatan kapasitas untuk melakukan *upgrading* tidak saja membutuhkan pemnafaat sumber daya dan peluang yang ada, namun juga mesti didukung dengan formulasi kebijakan yang tepat. Oleh karenanya, studi GVC dapat membantu mengidentifikasi titik lemah, kekuatan dan peluang industri, sehingga tentunya GVC dianggap berkontribusi pada

formulai kebijakan yang strategis untuk mendorong perluasan dampak globalisasi pada ekonomi lokal.

Setelah mengelaborasi isu pertumbuhan ekonomi dalam skenario GVC, praja sebagai calon aparatur telah memetakan beberapa komoditas yang harus menjadi prioritas nanti ketika telah resmi bertugas sebagai birokrat. Rente apa yang dimiliki, model upgrading yang dipilih serta tata kelola yang harus dijalankan telah tergambar dalam mindset berpikir calon aparatur.

Aspek Sosial: Membangun Birokrasi Yang Berperspektif Gender

Tujuan kebijakan afirmatif pada dasarnya untuk menentukan jumlah kritis (*critical mass*) sebagai prasyarat keterwakilan untuk mendorong perubahan menuju kesetaraan (CWI, 2018: 138). Namun membangun kesetaraan gender tidak bisa berhenti pada aspek kebijakan afirmatif yang kerap dikritik sebagai *reverse discrimination*. Dalam perspektif feminis liberal, pencapaian agregat perempuan dalam lembaga publik mesti di dorong, sebagaimana yang disebut sebelumnya, untuk mendorong perubahan menuju kesetaraan. Namun pencapaian agregat kuota 30 persen bagi beberapa pengkritiknya tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan yang mendasar.

Dalam perspektif feminis sosialis, akar utama dari masalah ketimpangan gender dan marginalisasi perempuan adalah budaya patriarkal. Budaya patriarkal adalah suatu pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat masyarakat. Akibatnya, laki-laki dianggap secara alamiah merupakan pemimpin, penentu, dan pengatur. Dalam perspektif ini, melampaui batasan legalistik tidaklah cukup jika budaya patriarkal masih dilanggengkan dalam berbagai struktur dan lembaga publik. Pada akhirnya, meski perempuan memegang kendali atau memenuhi kuota keterwakilan corak kebijakan yang dihasilkan belum tentu mewakili kepentingan perempuan. Pengkritik pendekatan feminis liberal menyayangkan, politisi perempuan dan pejabat perempuan justru kerap terjebak dalam *state masculinism*, dan menjadi aktor yang melanggengkan budaya yang bias gender itu.

Lovenduski dalam studinya (2002) menyebutkan ada batasan bias gender institusional yang menghalangi perempuan terlibat dalam *decision making process*. Ketika perempuan berhasil mencapai posisi publik terutama di parlemen, kerap mereka direndahkan dianggap tidak profesional, tidak kompeten, dan mencapai posisi tertentu 'kemurah-hatian' laki-laki. Di Indonesia, kerap para legislator perempuan mencapai posisi publik karena hubungan personal, misalnya karena ia istri seorang pejabat, adik pengusaha atau kerabat gubernur. Namun pemanfaatan atribut sosial juga kerap dilakukan oleh calon legislator laki-laki. Selanjutnya Lovenduski menyebutkan bahwa pandangan yang merendahkan kapabilitas perempuan ini dilanggengkan secara institusional, yang dapat dilihat dari adopsi ukuran profesionalisme dari perspektif laki-laki, dan ukuran kompeten juga dari perspektif laki-laki. Perempuan tidak diperhitungkan karena peran gender sebagai istri dan ibu yang kompetensinya disempitkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerja domestik. Akibatnya, kerap perempuan ditempatkan dalam posisi-posisi yang tidak strategis.

Dengan demikian, mencapai pembangunan yang berkesetaraan gender bermula dari penguatan pemahaman mengenai gender dan budaya setara gender dalam birokrasi kita. Para birokrat mesti memahami bahwa persoalan kesetaraan gender tidak

bisa disempitkan dalam makna teknis instrumentalisme namun juga persoalan keberpihakan pada nilai kesetaraan tersebut. Pemahaman kesetaraan yang berhulu pada nilai hak kemanusiaan yang mendasar, bisa meminimalkan kegamangan birokrat dalam menyusun kebijakan yang strategis, komprehensif, efektif dan responsif dalam masalah-masalah sosial.

Isu kesetaraan gender dalam pembangunan pada level birokrasi adalah pengambilan keputusan yang *wise gender*. Inilah yang masih digali dengan skema tidak hanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tetapi muatan keputusan juga harus *bepresktif gender*.

Aspek Lingkungan: Etika Lingkungan Bagi Pembangku Kepentingan

Sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh bagaimana pandangannya terhadap sesuatu itu, kalau sesuatu hal dipandang sebagai berguna dan penting, maka sikap dan perilaku terhadap sesuatu itu lebih banyak bersifat menghargai. Sebaliknya jika sesuatu hal dipandang dan dipahami sebagai sesuatu yang tidak berguna dan tidak penting, maka sikap dan perilaku yang muncul lebih banyak bersifat mengabaikan, bahkan merusak. Manusia memiliki pandangan tertentu pada alam dan lingkungannya, dimana pandangan itu telah menjadi landasan bagi tindakan, berpikir dan perilaku manusia terhadap alam.

Etika dangkal diartikan sebagai pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk meraih kepentingan manusia, yang bersifat antroposentrisme. Etika ekologi dangkal ini biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme serta ilmu pengetahuan mekanistik yang kemudian diikuti dan dianut oleh banyak ahli lingkungan. Kebanyakan para ahli lingkungan ini memiliki pandangan bahwa alam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Jadi, pusat pemikirannya adalah manusia. Kebijakan terhadap alam harus diarahkan untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia. Pandangan moral lingkungan yang antroposentrisme disebut juga sebagai *human centered ethic*, karena mengabaikan kedudukan dan peran moral lingkungan hidup yang terpusat pada manusia. Maka tidak heran kalau fokus perhatian dalam pandangan ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dalam alam semesta. Alam dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Dengan demikian alam dilihat sebagai alat bagi pencapaian tujuan manusia. Manusia diagungkan sebagai yang mempunyai nilai paling tinggi dan yang terpenting dalam kehidupan ini, jauh melebihi semua makhluk lain. Ajaran yang telah menempatkan manusia sebagai pusat suatu sistem alam semesta ini telah membuat arogan terhadap alam, dengan menjadikan sebagai objek untuk dieksploitasi.

Ditambahkan oleh kerf (2002) *shallow* bersifat instrumentalisme, di mana pola hubungan manusia dengan alam hanya terbatas pada relasi instrumental semata. Alam dilihat sebagai alat bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Walaupun manusia bersifat peduli terhadap alam, hal itu dilakukan semata-mata demi menjamin kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, dan bukan atas pertimbangan bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri.

Untuk menjelaskan kondisi lingkungan yang terjadi dewasa ini, sesungguhnya telah dijelaskan oleh Arne Naes dikutip dalam Chang (2001) bahwa nilai dari etika yang mengesampingkan aspek lingkungan demi kepentingan manusia atau dalam hal ini kita menyebutnya sebagai kepentingan ekonomi adalah etika yang dangkal (*Shallow*) dimana etika *Shallow* ini menjadikan manusia sebagai sebuah pusat moral dari seluruh makhluk lainnya yang ada di muka bumi, sehingga manusia dengan seluruh kebutuhannya menjadi prioritas utama dan harus dikejar dengan menghiraukan keberadaan makhluk lain di muka bumi.

Aspek lingkungan menjadi concern yang menarik bagi praja IPDN. Hal ini terlihat dari cukup intens dan panjang diskusi mengenai hal ini. Praja semakin sadar terhadap kebijakan yang polutif dan destruktif dalam upaya memelihara lingkungan sebagai aspek penting dalam pembangunan saat ini. Isu perubahan iklim dimkanai sebagai keterdesakan agenda pembangunan.

SIMPULAN

Setelah memberikan materi-materi yang terkait dengan aspek SDGs baik sosial, ekonomi dan lingkungan telah mampu memberikan wacana berfikir baru yang relevan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan dan pernyataan yang muncul dari praja mengindikasikan adanya perubahan wacana berfikir pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang beroreintasikan pada sosial dan ekonomi tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini pergeseran dan isu pembangunan berkelanjutan. Niai kesetaraan dan partisipasi menjadi model pembangunan yang dapat menopang tujuan pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

- Bappenas. (2017). *Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas.
- Chang, W. (2001). *Moral Lingkungan Hidup: Paradigma Baru*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gereffi, G. (2014). Global value chains in a post-Washington Consensus world. *Review of International Political Economy*, 21(1), 9-37.
- Keraf, S. (2002). *Etika lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari pembangunan*. Jakarta: Obor Indonesia.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© 2020 Alfian Hidayat, Purnama Safitri.

Published by LP3M of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)